

Udin Minta Penjelasan Walikota

Terkait Larangan Anggota Parpol Jabat Ketua RT/RW

BATAM (HK) — Udin P Sihaloho, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Batam meminta penjelasan kepada Walikota Batam, terkait larangan anggota Partai Politik (Parpol) menduduki jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) Batam, nomor 24 tahun 2017.

"Izin pimpinan, saya Udin P Sihaloho dari PDIP ingin

meminta penjelasan ke pak Walikota Batam, terkait larangan Anggota Parpol menjabat Ketua RT atau Ketua RW," ungkap Udin disela-sela Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Ranperda PKL, Senin (26/2).

Lebih lanjut ditanyakan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam ini, apa yang menjadi dasar Walikota Batam mengeluarkan



Udin Minta... Hal. 10

Udin P Sihaloho

Perwako tersebut. Sementara diketahui selama ini banyak Anggota Parpol menjabat sebagai Ketua RT dan RW.

"Saya minta ada penjelasan, karena ini menjadi keresahan saya, dan juga rekan saya Safari Ramadhan yang saat ini duduk sebagai Ketua RW," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Perwako tersebut bisa menimbulkan keresahan dan polemik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat ini memasuki tahun politik. Sementara di sisi

lain ada anggota Parpol tertentu bisa menduduki posisi Ketua RT/RW.

Sementara menurutnya, salah satu pasal di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5 tahun 2007, tidak mengatur adanya larangan anggota Parpol menjabat sebagai Ketua RT/RW.

"Mengacu pada Permendagri Nomor 5 tahun 2007, tidak ada larangan itu. Karenanya kita minta penjelasan Walikota Batam dalam paripurna mendatang," imbau Anggota DPRD

dari Dapil Bengkong-Batuampar ini.

Menjawab pertanyaan media, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan tidak ada persoalan selama ini, mungkin kebetulan di tempat Udin P Sihaloho yang terjadi masalah terkait.

"Nanti saya cek di bagian hukum kita, ada berapa ribuan RT/RW di Batam ini sampai hari ini saya belum dapat laporan ada persoalan," tegas Amsakar di loby DPRD Batam usai Paripurna. (ays)

Pemko Ajukan Pinjam Pakai 669 Ruas Jalan

BP Dukung Program Pelebaran Jalan

BATAM (HK) — Program Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam melakukan pelebaran ruas jalan didukung penuh oleh BP Batam, bentuk dukungan tersebut akan ditandai dengan penandatanganan MOU bersama terkait pinjam pakai lahan.

Kesepakatan pinjam pakai lahan diambil karena anggaran pembangunan jalan sudah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, namun

BP Dukung ... Hal. 10



WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi (kanan) tengah berbincang dengan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (kiri).

proses penghibahan aset dari BP Batam ke Pemko Batam masih belum diputuskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyampaikan berdasarkan hasil pertemuan dengan Pemko Batam didapat kesepakatan bahwa aset BP Batam yang terletak di row jalan sesuai peruntukannya akan diserahkan melalui mekanisme pinjam pakai.

"Tadi kita bahas bersama-sama. Kita sudah sepakat semua pasal-pasal di dalam pinjam pakai itu segera ditandatangani," katanya usai pertemuan tertutup di gedung Pemko Batam, Senin (26/2).

Menurutnya pilihan ini merupakan solusi terbaik sambil menunggu proses penghibahan lahan selesai dilakukan pada tingkat Kementrian Keuangan. Dengan harapan pembangunan infrastruktur Kota Batam bisa berkesinambungan.

"Selama dalam proses penghibahan, beliau (Walikota Batam) harus segera membangun. Sedang tidak bisa menunggu, beliau sudah menganggarkan jadi mekanismenya harus pinjam pakai," jelas Lukita.

Apabila infrastruktur terutama jalan dilakukan pembenahan secara baik maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Batam, karena bisa menjadi suatu kelebihan dalam mengenalkan Batam kepada investor luar.

"Kita lihat jalan-jalan di Batam sudah mulai bagus dan lebar. Selama ini aset pinjam pakai sudah berjalan dengan baik, apa yang dilakukan beliau (Walikota Batam) dalam membangun selama ini," ucap Lukita.

Mantan Sekretaris Menko Perekonomian ini berupaya menjadikan Batam sebagai pusat perekonomian masa depan, dengan cara menarik para investor luar sebanyak mungkin untuk menanamkan modal pada kegiatan industri dan pariwisata.

Dalam mewujudkan keinginan tersebut, maka dilakukannya pembenahan secara komprehensif mulai dari peningkatan pelayanan publik sampai persiapan infrastruktur. "Kami akan mengurus Bandara dan Pelabuhan," tutup Lukita.

Ditempat sama, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengungkapkan hal senada bahwa proses pinjam pakai lahan di row

jalan tinggal tahap penandatanganan. Apabila sudah dilakukan maka Pemko Batam akan mulai tahap pengerjaan karena anggaran sudah tersedia.

"Jadi gak bicara itu lagi (anggaran), sekarang bicara kewenangan lahan aja, itu ada di beliau (Kepala BP Batam). Kita dudukkan mana jalan yang mau kita lebarin," sampai Rudi.

Dia menyampaikan Pemko Batam juga akan menggusur bangunan yang berdiri di atas row jalan, sebab untuk mewujudkan Batam Modern perlu dilakukan perbaikan infrastruktur dengan harapan bisa mengurangi kemacetan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

"Dan mungkin tersandung masalah akan kita selesaikan, besok tanda tangan. untuk teknisnya ke PU," tutupnya.

Dalam kesempatan sama Kepala Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur mengatakan telah mengusulkan 669 ruas jalan yang akan dilakukan pelebaran, dari jumlah tersebut mayoritas jalan utama Provinsi Kepri.

"Sekarang ajukan jumlah 669 ruas jalan. Kalau titiknya banyak, intinya sekitar 669. Selain 10 titik dikrrjakan sekarang," katanya. (cw56)